

## IMPLIKASI PENGENAAN CUKAI ROKOK DI CV. GAGAK HITAM DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fawaid<sup>1</sup>, Silfin Aisyah<sup>2</sup>, Rosidah<sup>3</sup>, Siti Mutasyarofah<sup>4</sup>

Institut KH Yazid Karimullah<sup>1234</sup>

Email: ([fawaidfaid72@gmail.com](mailto:fawaidfaid72@gmail.com)), [silfin.aisyah@student.stisnq.ac.id](mailto:silfin.aisyah@student.stisnq.ac.id),  
[rosidah@student.stisnq.ac.id](mailto:rosidah@student.stisnq.ac.id), [siti.mutasyarofah@student.stisnq.ac.id](mailto:siti.mutasyarofah@student.stisnq.ac.id))

---

### Abstract

This study aims to analyze the urgency of imposing cigarette excise on CV. Gagak Hitam from the perspective of Islamic Economic Law. Cigarette excise policy in Indonesia serves two primary functions: as a source of state revenue and as an instrument to control cigarette consumption, which has negative impacts on public health. However, despite the continuous increase in excise rates in recent years, the level of cigarette consumption remains relatively high, raising questions regarding the effectiveness and relevance of this policy when reviewed through the principles of Sharia. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches. It applies an analysis based on the principles of justice ('adl), public interest (maslahah), balance (tawazun), as well as the legal maxim *la dharar wa la dhirar* (no harm and no reciprocating harm), within the framework of Maqashid Sharia, particularly the protection of life (hifzh al-nafs) and property (hifzh al-mal). The findings indicate that cigarette excise has normative legitimacy as long as it aims to achieve public benefit and does not result in injustice. However, its effectiveness requires periodic evaluation to ensure that it remains proportional and aligned with the principles of justice.

**Keywords:** Cigarette Excise, Islamic Economic Law, Fiscal Policy.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengenaan cukai rokok terhadap CV. Gagak Hitam dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kebijakan cukai rokok di Indonesia memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Namun, meskipun tarif cukai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tingkat konsumsi rokok masih relatif tinggi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan relevansi kebijakan tersebut jika ditinjau dari prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan analisis prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), serta kaidah *la dharar wa la dhirar* dan kerangka Maqashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan harta (hifzh al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai rokok memiliki legitimasi normatif selama bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak zalim, namun efektivitasnya perlu evaluasi berkala agar tetap proporsional dan adil.

**Kata Kunci:** Cukai Rokok, Hukum Ekonomi Syariah, Kebijakan Fiskal.

Copyright©2026 Lex Economica Journal. All rights reserved.

---

### Introduction

Kebijakan cukai rokok merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat pengendalian konsumsi barang yang dianggap berdampak negatif bagi masyarakat.<sup>1</sup> Di Indonesia, cukai hasil tembakau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tujuan menekan angka konsumsi rokok serta

---

<sup>1</sup> Aulana Dkk., "Kegagalan Sistem Perpajakan Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia."

mengurangi dampak kesehatan yang ditimbulkannya.<sup>2</sup> Kenaikan tarif tersebut secara teoritis didasarkan pada pendekatan pengendalian melalui harga (price control mechanism), di mana semakin tinggi harga rokok akibat cukai, maka permintaan diharapkan menurun. Namun demikian, di tengah tingginya tarif cukai yang dikenakan, realitas menunjukkan bahwa tingkat konsumsi rokok masih relatif tinggi dan Indonesia masih termasuk negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia.<sup>3</sup> Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dan relevansi kebijakan cukai tersebut, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan cukai memang berpengaruh terhadap penurunan konsumsi, tetapi dampaknya tidak selalu signifikan pada semua kelompok masyarakat. Menemukan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga, namun efeknya berbeda antar kelompok pendapatan.<sup>4</sup> Sementara itu, beban ekonomi akibat penyakit terkait rokok jauh lebih besar dibandingkan penerimaan fiskal yang diperoleh negara, sehingga kebijakan pengendalian konsumsi tetap relevan secara ekonomi makro.<sup>5</sup> Di sisi lain, tarif optimum cukai rokok menunjukkan bahwa terdapat titik keseimbangan tertentu yang dapat memaksimalkan penerimaan negara sekaligus menekan konsumsi secara lebih efektif.<sup>6</sup> Artinya, kebijakan cukai memerlukan formulasi yang tepat agar tidak sekadar meningkatkan penerimaan, tetapi juga benar-benar mencapai tujuan regulatifnya.

Dalam praktiknya, pengenaan cukai tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga secara langsung mempengaruhi produsen, termasuk perusahaan seperti CV. Gagak Hitam. Tarif cukai yang relatif besar dapat meningkatkan biaya produksi, mempersempit margin keuntungan, serta mempengaruhi keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.<sup>7</sup> Industri hasil tembakau juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik di sektor produksi maupun distribusi. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif cukai perlu dianalisis tidak hanya dari sisi kesehatan publik, tetapi juga dari sisi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan usaha.

---

<sup>2</sup> Samuel, "Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai."

<sup>3</sup> Julaecha Dan Wuryandari, "Pengetahuan Dan Sikap Tentang Perilaku Merokok Pada Remaja."

<sup>4</sup> Irawan, "Dampak Kebijakan Simplifikasi Layering Tarif Cukai Terhadap Fenomena Merokok Pada Usia Remaja Di Indonesia," 2024.

<sup>5</sup> Marbun, "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal," 2025.

<sup>6</sup> "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia | Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)."

<sup>7</sup> Rohmania, *Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* 2025.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta larangan menimbulkan kerugian (la dharar wa la dhirar).<sup>8</sup> Islam mengakui peran negara dalam mengatur perekonomian demi kemaslahatan masyarakat.<sup>9</sup> Konsep pajak dalam Islam dikenal dalam bentuk dharibah yang dapat dipungut dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan negara, dengan syarat tidak bersifat zalim dan proporsional.<sup>10</sup> Dengan demikian, legitimasi pengenaan cukai dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Persoalan muncul ketika tujuan utama pengenaan cukai, yaitu membatasi konsumsi rokok, belum sepenuhnya tercapai. Meskipun tarif cukai terus meningkat, jumlah perokok tetap tinggi, bahkan di kalangan usia produktif.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulatif kebijakan dan realitas di lapangan. Jika kebijakan cukai lebih dominan berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dibandingkan sebagai instrumen pengendalian konsumsi, maka diperlukan evaluasi kebijakan secara komprehensif agar tidak bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam syariah.

Dalam kerangka Maqashid Syariah, kebijakan ekonomi harus selaras dengan tujuan menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan harta (hifzh al-mal).<sup>12</sup> Rokok sering dikaitkan dengan potensi kerusakan kesehatan sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap perlindungan jiwa. Dari sudut pandang ini, kebijakan cukai dapat dipahami sebagai upaya negara untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Akan tetapi, peningkatan tarif cukai juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi pelaku usaha, sehingga diperlukan analisis yang seimbang antara perlindungan jiwa dan perlindungan harta.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi pengenaan cukai rokok terhadap CV. Gagak Hitam dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, menilai efektivitas kebijakan cukai dalam mencapai tujuan pengendalian konsumsi, dan mengkaji keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha berdasarkan prinsip maqashid syariah. Adapun urgensi penelitian ini terletak pada

---

<sup>8</sup> "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Maslahah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi | Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah."

<sup>9</sup> Hasan Dkk., "Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah Di Indonesia."

<sup>10</sup> Daryanti Dkk., "Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam."

<sup>11</sup> "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok Di Indonesia | Kajian Ekonomi Dan Keuangan."

<sup>12</sup> "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal | Jurnal Global Ilmiah."

<sup>13</sup> P Dkk., "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Fenomena Downtrading Rokok Terhadap Penerimaan Negara Dan Produksi Tembakau Domestik 2023."

pentingnya memberikan analisis normatif-syariah terhadap kebijakan fiskal yang berdampak luas, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan akademik maupun kebijakan dalam merumuskan kebijakan cukai yang lebih adil dan proporsional.

Kajian terdahulu yang relevan antara lain penelitian I Yusron (2025) yang meneliti dampak tarif cukai terhadap konsumsi rokok rumah tangga dari perspektif ekonomi kuantitatif.<sup>14</sup> Penelitian tersebut fokus pada aspek elastisitas permintaan dan belum mengkaji dimensi normatif syariah. Selain itu, Rendi Antika (2025) menganalisis tarif optimum cukai rokok dengan pendekatan ekonomi fiskal, tetapi tidak membahas aspek keadilan dan maqashid syariah.<sup>15</sup> Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengintegrasikan analisis kebijakan fiskal cukai rokok dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dan Maqashid Syariah secara khusus pada konteks pelaku usaha tertentu, yaitu CV. Gagak Hitam.

Kebaruan lainnya terletak pada upaya menempatkan kebijakan cukai tidak semata sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai kebijakan publik yang harus diuji melalui prinsip keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan.<sup>16</sup> Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai legitimasi normatif pengenaan cukai, tetapi juga menguji relevansi dan proporsionalitasnya dalam konteks sosial-ekonomi aktual. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan.

### **Research Problems**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana urgensi pengenaan cukai rokok terhadap CV. Gagak Hitam dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apakah kebijakan cukai rokok sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam islam?

### **Research Methods**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini terletak pada analisis norma hukum, asas, serta sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan kebijakan cukai dalam perspektif

---

<sup>14</sup> Yusro, "Dampak Kebijakan Tarif Cukai Terhadap Konsumsi Rokok Dan Penerimaan Negara."

<sup>15</sup> Rendi Antika, *Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi*.

<sup>16</sup> Marbun, "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal," 2025.

Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian normatif menekankan pada analisis terhadap struktur dan konsistensi norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat praktik empiris, tetapi juga menilai kesesuaian kebijakan cukai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji regulasi terkait cukai hasil tembakau, termasuk hierarki peraturan serta legitimasi kewenangan negara dalam menetapkan tarif cukai.<sup>17</sup> Pendekatan ini penting untuk menilai keselarasan antara kebijakan fiskal dan sistem hukum nasional. Analisis dilakukan terhadap norma hukum yang menjadi dasar pengenaan cukai dan tujuan pembentukannya dalam konteks pengendalian konsumsi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep dalam Hukum Ekonomi Syariah seperti masalah, keadilan ('adl), proporsionalitas, dan kaidah la dharar wa la dhirar. Konseptualisasi prinsip masalah dalam kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam analisis hukum Islam kontemporer.<sup>18</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan cukai mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan pelaku usaha.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi ini merupakan karakteristik utama penelitian hukum normatif.<sup>19</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang cukai. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku Hukum Ekonomi Syariah, artikel akademik, dan hasil penelitian terbaru yang relevan dengan tema kebijakan fiskal dan maqashid syariah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang menekankan pada analisis dokumen hukum dan literatur ilmiah.<sup>20</sup> Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai urgensi pengenaan cukai berdasarkan pendekatan Maqashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan perlindungan harta (hifzh al-mal).

## Discussion

### Gambaran Umum Pengenaan Cukai terhadap CV. Gagal Hitam

---

<sup>17</sup> "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Administrasi Penyalahgunaan Pita Cukai Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Unissula Repository."

<sup>18</sup> Ys Dan Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer."

<sup>19</sup> Ahmad Dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*.

<sup>20</sup> Azzahra Dan Prianto, "Tinjauan Literatur Sistematis."

Cukai hasil tembakau di Indonesia merupakan instrumen fiskal yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat pengendalian konsumsi.<sup>21</sup> Secara regulatif, cukai dikenakan atas barang yang memiliki eksternalitas negatif, termasuk rokok yang berdampak pada kesehatan masyarakat.<sup>22</sup> Dalam konteks industri hasil tembakau, kebijakan cukai dirancang untuk menekan prevalensi merokok sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara.<sup>23</sup>

CV. Gagak Hitam sebagai pelaku usaha di sektor hasil tembakau turut terdampak oleh kenaikan tarif cukai yang progresif dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan tarif tersebut berimplikasi langsung terhadap struktur biaya produksi dan harga jual produk.<sup>24</sup> Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan tarif cukai berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan kecil dan menengah di sektor rokok.<sup>25</sup> Selain itu, industri hasil tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga perubahan kebijakan fiskal berdampak pada stabilitas ekonomi pekerja.<sup>26</sup>

Namun demikian, data menunjukkan bahwa prevalensi merokok di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara.<sup>27</sup> Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan cukai dalam menekan konsumsi.<sup>28</sup>

### **Cukai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, negara memiliki otoritas fiskal sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik.<sup>29</sup> Konsep dharibah dalam literatur fiqh siyasah memperbolehkan pungutan negara dalam kondisi tertentu.<sup>30</sup> Namun, prinsip utama yang harus dijaga adalah keadilan ('adl) dan tidak adanya unsur kezaliman.

---

<sup>21</sup> Cnossen, *Excise Taxation For Domestic Resource Mobilization*.

<sup>22</sup> World Health Organization. *Who Report On The Global Tobacco Epidemic, 2023*. Geneva: Who, 2023.

<sup>23</sup> Hartini Dan Habibi, "Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard."

<sup>24</sup> Zulfah Dkk., "Perubahan Tarif Dalam Perdagangan Internasional."

<sup>25</sup> Widiyati Dkk., "Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Terdampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Studi Pada Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tahun 2017-2021)."

<sup>26</sup> Putri Dan Addiansyah, "Evaluasi Dampak Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Terhadap Kesejahteraan Buruh Rokok Di Kudus."

<sup>27</sup> Kresnayana Dan Bagiastara, "Studi Perbandingan Legalitas Pengaturan E-Cigarettes Di Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara."

<sup>28</sup> Putri Dkk., "Efektivitas Kebijakan Cukai Dan Desain Kemasan Rokok Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Mahasiswa."

<sup>29</sup> Chapra, *The Future Of Economics*.

<sup>30</sup> Sholahudin Dkk., "Konsep Pendapatan Negara Dalam Pemikiran Al-Mawardi Dan Relevansinya Bagi Keuangan Publik."

Cukai rokok dapat dikategorikan sebagai kebijakan reguler yang bertujuan membatasi konsumsi atas barang yang memiliki potensi mafsadah.<sup>31</sup> Dalam teori kebijakan publik Islam, intervensi negara dibenarkan apabila bertujuan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.<sup>32</sup> Akan tetapi, kebijakan tersebut harus proporsional dan tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan pelaku usaha secara berlebihan.

### Analisis Berdasarkan Maqashid Syariah

Pertama, perlindungan jiwa merupakan tujuan utama syariat. Rokok secara medis terbukti berkorelasi dengan berbagai penyakit kronis.<sup>33</sup> Oleh karena itu, kebijakan cukai dapat dipahami sebagai instrumen preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat.<sup>34</sup> Jika tarif cukai efektif menurunkan konsumsi, maka kebijakan tersebut selaras dengan prinsip *hifzh al-nafs*. Namun, penelitian menunjukkan bahwa elastisitas permintaan rokok di Indonesia relatif rendah.<sup>35</sup> Artinya, kenaikan harga belum tentu signifikan menurunkan jumlah perokok, terutama di kalangan dewasa produktif.

Kedua, selain menjaga jiwa, syariah juga menekankan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Industri rokok menyumbang penerimaan negara yang signifikan.<sup>36</sup> Namun, beban cukai yang tinggi dapat memicu penurunan daya saing industri domestik.<sup>37</sup> Dalam perspektif *maqashid*, kebijakan yang menimbulkan mafsadah ekonomi perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keseimbangan.<sup>38</sup>

### Prinsip La Dharar wa La Dhirar

Kaidah fiqh "*la dharar wa la dhirar*" mengandung makna bahwa kebijakan publik tidak boleh menimbulkan bahaya yang lebih besar.<sup>39</sup> Dalam konteks cukai rokok, terdapat dua dimensi bahaya: bahaya kesehatan dan bahaya ekonomi.

---

<sup>31</sup> "Pengaturan Objek Barang Kena Cukai Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan | Litigasi."

<sup>32</sup> "Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam | Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam."

<sup>33</sup> "Ancaman Merokok Bagi Kesehatan: Perspektif Medis Dan Nilai Islam | Jurnal Keilmuan Dan Keislaman."

<sup>34</sup> Williem Dan Julitawaty, "Peran Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia."

<sup>35</sup> Shaleha, "Pengaruh Peredaran Hasil Tembakau Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pada Wilayah Kppbc Tmp C Madiun."

<sup>36</sup> Marbun, "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal," 2025.

<sup>37</sup> S Dkk., "Protectionism In Economic Policy."

<sup>38</sup> "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi | Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah."

<sup>39</sup> "Perbandingan Konsep La Dharar Wa La Dhirar Dalam Fiqh Klasik Dengan Regulasi Perlindungan Konsumen Syariah Kontemporer | Integrative Perspectives Of Social And Science Journal."

Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mampu meminimalkan keduanya secara proporsional.<sup>40</sup>

### **Relevansi dan Urgensi Pengenaan Cukai**

Urgensi pengenaan cukai dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bergantung pada efektivitasnya dalam mewujudkan masalah yang lebih dominan daripada mafsadah.<sup>41</sup> Jika kebijakan lebih berorientasi pada penerimaan negara dibandingkan pengendalian konsumsi, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan.<sup>42</sup> Oleh karena itu, evaluasi berkala berbasis data empiris dan prinsip maqashid menjadi penting.

Secara keseluruhan, kebijakan cukai terhadap CV. Gagak Hitam memiliki legitimasi normatif dalam Islam, tetapi harus dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan efektivitas. Hukum Ekonomi Syariah menuntut keseimbangan antara hifzh al-nafs dan hifzh al-mal agar kebijakan fiskal benar-benar membawa kemaslahatan publik secara komprehensif.

### **Evaluasi Efektivitas dan Tantangan Implementasi Kebijakan Cukai Rokok**

Urgensi pengenaan cukai rokok terhadap CV. Gagak Hitam tidak dapat dilepaskan dari persoalan efektivitas kebijakan secara empiris. cukai merupakan instrumen fiskal yang efektif untuk mengendalikan konsumsi barang yang memiliki eksternalitas negatif. Dalam konteks rokok, kenaikan tarif cukai diharapkan mampu menekan permintaan melalui mekanisme harga. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai hasil tembakau di Indonesia memang berpengaruh terhadap penurunan konsumsi rumah tangga, meskipun dampaknya berbeda-beda antar kelompok masyarakat.<sup>43</sup>

Kenaikan tarif cukai memiliki korelasi negatif terhadap konsumsi rokok rumah tangga, yang berarti semakin tinggi tarif cukai, semakin rendah tingkat konsumsi.<sup>44</sup> Namun demikian, penelitian tersebut juga menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pengawasan terhadap rokok ilegal dan struktur pasar industri rokok nasional. Tanpa pengawasan yang optimal, kenaikan tarif cukai berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke rokok ilegal yang tidak dikenakan cukai.

---

<sup>40</sup> Marbun, "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal," 2025.

<sup>41</sup> Pratama, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus."

<sup>42</sup> Pratama, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus."

<sup>43</sup> Irawan, "Dampak Kebijakan Simplifikasi Layering Tarif Cukai Terhadap Fenomena Merokok Pada Usia Remaja Di Indonesia," 2024.

<sup>44</sup> "Repository Politeknik Negeri Bali."

Permasalahan rokok ilegal menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan cukai di Indonesia. Penelitian dalam *World Customs Journal* menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara sekaligus menjaga efektivitas kebijakan fiskal.<sup>45</sup> Artinya, kebijakan cukai tidak dapat berdiri sendiri; ia harus didukung oleh sistem pengawasan dan penindakan yang kuat agar tujuan regulatif dan budgetair dapat tercapai secara simultan.

Selain aspek pengendalian konsumsi, cukai rokok juga memiliki peran strategis dalam struktur penerimaan negara.<sup>46</sup> Laporan dan kajian kebijakan fiskal menunjukkan bahwa penerimaan dari cukai hasil tembakau merupakan salah satu kontributor signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>47</sup> Dana tersebut kemudian dialokasikan kembali untuk pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, aspek ini dapat dipandang sebagai bentuk realisasi kemaslahatan publik (masalah 'ammah), selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Namun demikian, dilema muncul ketika fungsi penerimaan negara berpotensi berbenturan dengan fungsi pengendalian konsumsi. Jika penerimaan cukai meningkat karena konsumsi tetap tinggi, maka tujuan perlindungan kesehatan belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan keseimbangan antara dua fungsi tersebut. Studi mengenai tarif optimum cukai rokok menunjukkan bahwa terdapat titik keseimbangan tertentu di mana tarif dapat memaksimalkan penerimaan negara sekaligus menekan konsumsi secara lebih efektif.<sup>48</sup> Pendekatan berbasis tarif optimum ini relevan dalam perspektif maqashid syariah karena mencerminkan prinsip keseimbangan (tawazun) dan proporsionalitas.

Bagi pelaku usaha seperti CV. Gagak Hitam, kenaikan tarif cukai berdampak langsung pada struktur biaya produksi dan strategi bisnis. Penelitian kebijakan publik menunjukkan bahwa perusahaan rokok skala kecil dan menengah lebih rentan terhadap tekanan kenaikan tarif dibandingkan perusahaan besar yang memiliki kapasitas modal dan diversifikasi produk lebih luas (Marbun, 2025). Dalam konteks ini, kebijakan yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan

---

<sup>45</sup> "Kegagalan Sistem Perpajakan Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)."

<sup>46</sup> Marbun, "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal," 2025.

<sup>47</sup> Ramadhany Nugroho Dan Erna Setijanigrum, "Indonesia's New Capital."

<sup>48</sup> M.H, *Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai - Strategi Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara*.

diferensiasi skala usaha dapat menimbulkan ketimpangan dan berpotensi mengurangi daya saing pelaku usaha kecil.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi tersebut perlu dianalisis melalui prinsip keadilan ('*adl*) dan kaidah *la dharar wa la dhirar*. Kebijakan publik idealnya tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Jika kenaikan cukai secara signifikan membebani pelaku usaha kecil tanpa diimbangi dengan pengendalian rokok ilegal dan kebijakan pendukung lainnya, maka potensi kemudaratatan ekonomi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, urgensi pengenaan cukai terhadap CV. Gagak Hitam harus dipahami tidak hanya dari sisi legitimasi normatif, tetapi juga dari efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi.

Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas kebijakan cukai menunjukkan bahwa instrumen ini tetap relevan sebagai alat pengendalian konsumsi dan sumber penerimaan negara. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara penetapan tarif yang proporsional, pengawasan rokok ilegal, serta kebijakan pendukung yang memperhatikan keberlangsungan usaha. Dalam kerangka *maqashid syariah*, kebijakan cukai dapat dinilai urgensinya sepanjang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) secara adil dan berkelanjutan.

## Conclusion

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengenaan cukai terhadap CV. Gagak Hitam memiliki legitimasi karena bertujuan melindungi kemaslahatan umum, khususnya kesehatan masyarakat (*hifzh al-nafs*). Namun, efektivitas kebijakan masih perlu dievaluasi mengingat konsumsi rokok tetap tinggi, sementara kenaikan cukai memberikan beban ekonomi bagi pelaku usaha, sehingga berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Oleh karena itu, kebijakan cukai harus dilaksanakan secara proporsional dengan berpedoman pada prinsip keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *la dharar wa la dhirar*, sehingga mampu menyeimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dengan keberlanjutan ekonomi pelaku usaha serta menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada kemudaratatan.

## References

- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok Di Indonesia | Kajian Ekonomi Dan Keuangan." Diakses 28 Februari 2026. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/view/1005>.

“Ancaman Merokok Bagi Kesehatan: Perspektif Medis Dan Nilai Islam | Jurnal Keilmuan Dan Keislaman.” Diakses 28 Februari 2026. <https://jsr.ums.ac.id/jkk/article/view/720>.

Aulana, Muhammad Saukhan, Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Azahra Wulandari Aji, Dan Aditya Amarta Putra. “Kegagalan Sistem Perpajakan Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)* 7, No. 1 (2025): 71–79. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15051>.

Azzahra, Fedhira Syaila Putri, Dan Cahyo Prianto. “Tinjauan Literatur Sistematis: Analisis Implementasi Kecerdasan Buatan Untuk Verifikasi Dokumen.” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 4, No. 3 (2025): 417–30. <https://doi.org/10.51903/kjw708>.

Chapra, M. Umer. *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd, 2016.

Cnossen, Sijbren. *Excise Taxation For Domestic Resource Mobilization*. T.T.

Daryanti, Daryanti, Asriyana Asriyana, Dan Astuty Hasti. “Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam.” *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, No. 1 (2024): 61–70. <https://doi.org/10.37476/Akmen.V21i1.4611>.

Hartini, Hartini, Dan Dhani Habibi. “Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard.” *Indo-Fintech Intellectuals Journal Of Economics And Business* 3 (September 2023): 198–209. <https://doi.org/10.54373/lfijeb.V3i2.156>.

Hasan, Asyari, Anisa Nurfitriani, Hesti Putri Rachman, Reja Wardana Putra, Dan Muhammad Fikri Fadhillah. “Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 17 (2024): 187–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13853624>.

“Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam | Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam.” Diakses 28 Februari 2026. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam/article/view/7885>.

Irawan, Endrah Ilham Purna. “Dampak Kebijakan Simplifikasi Layering Tarif Cukai Terhadap Fenomena Merokok Pada Usia Remaja Di Indonesia.” *Journal Of Tax Policy, Economics, And Accounting* 2, No. 2 (2024): 80–94. <https://doi.org/10.61261/taxpedia.v2i2.40>.

Irawan, Endrah Ilham Purna. “Dampak Kebijakan Simplifikasi Layering Tarif Cukai Terhadap Fenomena Merokok Pada Usia Remaja Di Indonesia.” *Journal Of Tax Policy, Economics, And Accounting* 2, No. 2 (2024): 80–94. <https://doi.org/10.61261/taxpedia.v2i2.40>.

- Julaecha, Julaecha, Dan Ajeng Galuh Wuryandari. "Pengetahuan Dan Sikap Tentang Perilaku Merokok Pada Remaja." *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi* 10, No. 2 (2021): 313–18. <https://doi.org/10.36565/Jab.V10i2.337>.
- "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia | Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)." Diakses 28 Februari 2026. <http://www.ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/jiask/article/view/251>.
- "Kegagalan Sistem Perpajakan Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)." Diakses 28 Februari 2026. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/15051>.
- Kresnayana, I. Made, Dan I. Nyoman Bagiastra. "Studi Perbandingan Legalitas Pengaturan E-Cigarettes Di Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, No. 1 (2021): 125. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.V10.I01.P10>.
- "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi | Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah." Diakses 28 Februari 2026. <https://journal.um-surabaya.ac.id/mas/article/view/25234>.
- "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi | Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah." Diakses 28 Februari 2026. <https://journal.um-surabaya.ac.id/mas/article/view/25234>.
- Marbun, Frederic Kornelius. "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 7, No. 2 (2025): 171–82. <https://doi.org/10.48093/jiask.V7i2.251>.
- Marbun, Frederic Kornelius. "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 7, No. 2 (2025): 171–82. <https://doi.org/10.48093/jiask.V7i2.251>.
- Marbun, Frederic Kornelius. "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 7, No. 2 (2025): 171–82. <https://doi.org/10.48093/jiask.V7i2.251>.
- Marbun, Frederic Kornelius. "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 7, No. 2 (2025): 171–82. <https://doi.org/10.48093/jiask.V7i2.251>.

- Marbun, Frederic Kornelius. "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 7, No. 2 (2025): 171–82. <https://doi.org/10.48093/Jiask.V7i2.251>.
- M.H, David Munsir, S. H. *Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai - Strategi Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara*. Jariah Publishing Intermedia, 2025.
- P, Ginanjar Perdana, Eva Wany Wany, Dan Budi Prayitno. "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Fenomena Downtrading Rokok Terhadap Penerimaan Negara Dan Produksi Tembakau Domestik 2023." *Income* 5, No. 2 (2024): 202–16. <https://doi.org/10.38156/Akuntansi.V6i1.505>.
- "Pengaturan Objek Barang Kena Cukai Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan | Litigasi." Diakses 28 Februari 2026. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/4233>.
- "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal | Jurnal Global Ilmiah." Diakses 28 Februari 2026. <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/196>.
- "Perbandingan Konsep La Dharar Wa La Dhirar Dalam Fiqh Klasik Dengan Regulasi Perlindungan Konsumen Syariah Kontemporer | Integrative Perspectives Of Social And Science Journal." Diakses 28 Februari 2026. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/971>.
- Pratama, Krisna Galih. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terhadap Larangan Penjualan Rokok Eceran Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus: Pedagang Di Kota Metro)." Undergraduate, Iain Metro, 2025. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11720/>.
- Putri, Awwaliya, Dan M. Nur Rofiq Addiansyah. "Evaluasi Dampak Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Terhadap Kesejahteraan Buruh Rokok Di Kudus." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 11, No. 1 (2026): 1–21.
- Putri, Kartika Pratiwi, Anne Lasminingrat, Dan Meita Candra Devi. "Efektivitas Kebijakan Cukai Dan Desain Kemasan Rokok Dalam Menekan Perilaku Konsumtif Mahasiswa." *Journal Of Innovation And Research In Agriculture* 4, No. 1 (2025): 46–52. <https://doi.org/10.56916/Jira.V4i1.2139>.
- Ramadhany Nugroho Dan Erna Setijaningrum. "Indonesia's New Capital: An Analysis Of Transparency, Public Participation, And Deliberative Democracy." *Journal Of Namibian Studies : History Politics Culture* 35 (Juli 2023): 1842–74. <https://doi.org/10.59670/Jns.V35i.3904>.

- “Rekontruksi Regulasi Sanksi Administrasi Penyalahgunaan Pita Cukai Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Unissula Repository.” Diakses 28 Februari 2026. <https://Repository.Unissula.Ac.Id/30938/>.
- Rendi Antika, 21211769. *Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi : Studi Aplikasi Pemikiran Wasfi Āsyur Abu Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi*. 2025. <https://Repository.Iiq.Ac.Id//Handle/123456789/4675>.
- “Repository Politeknik Negeri Bali.” Diakses 28 Februari 2026. <https://Repository.Pnb.Ac.Id/Id/Eprint/16683/>.
- Rohmania, Dinda Ma’rifatur. *Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* 2025. T.T.
- S, Angel Icha Leony Lastiur, Diva Nayla Salsabila, Sofi Ayyasi, Dan Wahjoe Pangestoeti. “Protectionism In Economic Policy: Peran Pajak Perdagangan Internasional Dalam Perlindungan Industri Dalam Negeri.” *Edu Sociata ( Jurnal Pendidikan Sosiologi )* 8, No. 1 (2025): 371-77. <https://doi.org/10.33627/Es.V8i1.3455>.
- Samuel, Samuel. “Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai.” *Jurnal Bppk: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 15, No. 2 (2022): 01-15. <https://doi.org/10.48108/Jurnalbppk.V15i2.698>.
- Shaleha, Dyah Ayu Murni. “Pengaruh Peredaran Hasil Tembakau Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Pada Wilayah Kppbc Tmp C Madiun.” *Ktta, Politeknik Keuangan Negara Stan*, 2023. <https://eprints.pknstan.ac.id/2563/>.
- Sholahudin, Muhamad Afif, Mega Silvia, Yadi Janwari, Dan Dedah Jubaedah. “Konsep Pendapatan Negara Dalam Pemikiran Al-Mawardi Dan Relevansinya Bagi Keuangan Publik : The Concept Of State Revenue In Al-Mawardi’s Thought And Its Relevance To Modern Public.” *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 3, No. 1 (2026): 153-67.
- Widiyati, Sri, Embun Duriyany, Winarni Winarni, Gunawan Setianegara, Dan Nurseto Adhi. “Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Terdampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Studi Pada Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tahun 2017-2021).” *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 6, No. 1 (2024). <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/Sentrikom/Article/View/5550>.
- Williem, Clarissa Aurelia, Dan Wily Julitawaty. “Peran Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat Indonesia.” *Jurnal*

*Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 1, No. 3 (2024): 174–84. <https://doi.org/10.59407/Jakpt.V1i3.579>.

World Health Organization. *Who Report On The Global Tobacco Epidemic*, 2023. Geneva: Who, 2023.

Ys, Irsyad Al Fikri, Dan Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)* 3, No. 2 (2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/Ejil.V3i2.1936>.

Yusro, Ichwanto. "Dampak Kebijakan Tarif Cukai Terhadap Konsumsi Rokok Dan Penerimaan Negara." Skripsi, Politeknik Keuangan Negara Stan, 2025. <https://eprints.pknstan.ac.id/2834/>.

Zulfah, Indana, Inka Aulia Annisa Febrianti, Nabila Fatin Hasna Nur 'Aini, Dan Nadim Rifki. "Perubahan Tarif Dalam Perdagangan Internasional: Analisis Dampak Daya Saing Produk Lokal Di Pasar Global." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 17, No. 11 (2025): 51–60. <https://doi.org/10.2324/Tcs3nw63>.